

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DENGAN KINERJA MANAJERIAL SEBAGAI VARIABEL
MODERASI**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh
gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun).



Oleh :

ZULFA ROMIZAH
NIM : 4319134

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

2023

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DENGAN KINERJA MANAJERIAL SEBAGAI VARIABEL
MODERASI**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh
gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun).



Oleh :

ZULFA ROMIZAH
NIM : 4319134

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

2023

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Zulfa Romizah

NIM : 4319134

Judul Skripsi : **Faktor-faktor Yang Memengaruhi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dengan Kinerja Manajerial Sebagai Variabel Moderasi**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini adalah benar-benar hasil karya penulis kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 30 Januari 2023

Yang menyatakan,



Zulfa Romizah

NOTA PEMBIMBING

Novendi Arkham Mubtadi, M. Akun

RT 2 RW 3 Desa Ciberung Kecamatan Ajibarang Kab. Banyumas

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Zulfa Romizah

Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Ketua Program Studi Akuntansi Syariah

PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi Saudari:

Nama : **Zulfa Romizah**

NIM : **4319134**

Judul Skripsi : **Faktor-faktor Yang Memengaruhi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dengan Kinerja Manajerial Sebagai Variabel Moderasi**

Naskah tersebut sudah memenuhi persyaratan untuk dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 30 Januari 2023

Pembimbing,


Novendi Arkham Mubtadi, M. Akun

NIP. 19891103 201908 1 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Pahlawan KM. 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Kode Pos 51161
www.febi.uingusdur.ac.id email: febi@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

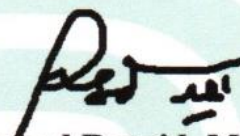
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan skripsi Saudari:

Nama : **Zulfa Romizah**
NIM : **4319134**
Judul Skripsi : **Faktor-faktor Yang Memengaruhi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dengan Kinerja Manajerial Sebagai Variabel Moderasi**

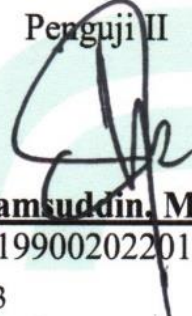
Telah diujikan pada hari Senin tanggal 03 April 2023 dan dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun).

Dewan Penguji,

Penguji I


Ahmad Rosyid, M.Si
NIP. 197903312006041003

Penguji II


Syamsuddin, M.Si
NIP. 199002022019031011

Pekalongan, 08 Mei 2023

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam


Dr. Hj. Shinta Dewi Rismawati, S.H., M.H.
NIP. 197502201999032001

PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun) di Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Penulis menyadari sepenuhnya atas segala keterbatasan dan banyaknya kekurangan-kekurangan yang harus diperbaiki dalam penulisan skripsi ini. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan informasi dan manfaat bagi setiap orang yang membacanya, khususnya bagi dunia pendidikan. Dalam pembuatan Skripsi ini penulis banyak mendapatkan berbagai dukungan serta bantuan materil maupun non materil dari berbagai pihak. Berikut ini beberapa persembahan sebagai ucapan terima kasih dari penulis kepada pihak-pihak yang telah berperan dalam membantu terlaksananya penulisan Skripsi ini:

1. Kedua orang tua saya tercinta Bapak Chadlaro dan Ibu Musalmah yang tak lupa mendo'akan, menasehati, memberi semangat serta arahan dalam proses penulisan skripsi ini.
2. Kedua kakak saya, Mahmudah dan Miftah Farid yang telah memberikan banyak motivasi dan memberikan bantuan dukungan material dan moral.
3. Keponakan saya, Syakila Khalif At-Lair yang telah memberikan semangat dan selalu menemani saya saat penulisan skripsi ini.
4. Almamater saya Program Studi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

5. Dosen pembimbing, Bapak Novendi Arkham Mubtadi, M.Akun yang telah membimbing saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Dosen wali saya, Ibu Siti Aminah Caniago yang sudah memberikan arahan terbaik selama kuliah.
7. Sahabat-sahabat saya terkhusus Aulia Ananda Safitri, Sakinatun Nabila, Lutfi Al-Viani, Zulva Ainurrohmah, Indah Zulfa yang bersedia untuk bertukar pikiran, memberi dukungan serta motivasi tiada henti dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Teman-teman perkuliahan khususnya teman seperjuangan Akuntansi Syariah angkatan 2019 yang telah kebersamai selama kuliah.
9. Teman-teman UKM-F Kewirausahaan yang telah memberikan kesempatan berkarir di dunia organisasi.
10. Teman-teman PPL dan KKN yang selalu mendukung dan memberikan semangat dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
11. Diri sendiri atas semangat untuk berproses dan mampu bertahan sampai sejauh ini.

MOTTO

Barangsiapa yang bertaqwa kepada Allah, niscaya diberi-nya kelapangan dan rezeki yang tidak disangka. Dan barangsiapa yang bertawakal kepada Allah maka cukuplah Allah baginya. Sesungguhnya Allah melaksanakan kehendak-Nya, Dia telah menjadikan untuk setiap sesuatu kadarnya

(Q.S Ath-Thalaq: 2-3)

ABSTRAK

ZULFA ROMIZAH. Faktor-faktor Yang Memengaruhi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan Kinerja Manajerial sebagai Variabel Moderasi

Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui pertanggungjawaban secara berkala. Penelitian ini membahas mengenai ketaatan pada peraturan perundangan, kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi, dan sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dengan kinerja manajerial sebagai variabel moderasi.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menguji pengaruh ketaatan pada peraturan perundangan, kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi, dan sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di OPD Kabupaten Pekalongan dengan kinerja manajerial sebagai variabel moderasi. Penelitian ini termasuk jenis penelitian kuantitatif dengan pendekatan *survey*. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode kuesioner dengan 66 responden. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Metode analisis data menggunakan *Structural Equation Modelling (SEM)-Partial Least Square (PLS)* dengan bantuan software SmartPLS Versi 3.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketaatan pada peraturan perundangan dan pengendalian akuntansi berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sedangkan kejelasan sasaran anggaran dan sistem pelaporan tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Kemudian kinerja manajerial tidak mampu memoderasi pengaruh ketaatan pada peraturan perundangan, kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi, dan sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Kata Kunci: Ketaatan pada Peraturan Perundangan, Kejelasan Sasaran anggaran, Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan, Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Kinerja Manajerial

ABSTRACT

ZULFA ROMIZAH. Factors That Affect The Performance Accountability of Government Agencies with Managerial Performance as Moderating Variables

Accountability for the performance of government agencies is the obligation of government agencies to account for the success and failure of the organization's mission in achieving the goals set through periodic accountability. This study discusses adherence to laws and regulations, clarity of budget targets, accounting controls, and reporting systems on government agency performance accountability with managerial performance as a moderating variable.

The purpose of this study was to determine and examine the effect of adherence to laws and regulations, clarity of budget targets, accounting controls, and reporting systems on the performance accountability of government agencies in OPD Pekalongan Regency with managerial performance as a moderating variable. This research is a type of quantitative research with a survey approach. The data collection method in this study used a questionnaire method with 66 respondents. The sampling technique in this study used a purposive sampling technique. The data analysis method uses is Structural Equation Modelling (SEM)-Partial Least Square (PLS) with the help of SmartPLS software Version 3.

The results of the study show that adherence to laws and accounting controls has an effect on accountability for the performance of government agencies, while the clarity of budget targets and reporting systems has no effect on accountability for the performance of government agencies. Then managerial performance is not able to moderate the effect of adherence to laws and regulations, clarity of budget targets, accounting controls, and reporting systems on government agency performance accountability.

Keywords: Compliance with Laws and Regulations, Clarity of Budget Targets, Accounting Control, Reporting Systems, Government Agency Performance Accountability and Managerial Performance

KATA PENGANTAR


Puji syukur saya sampaikan kepada Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi Program Studi Akuntansi Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya sampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Zaenal Mustakim, M. Ag selaku Rektor UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan
2. Dr. Shinta Dewi Rismawati, M.H selaku Dekan FEBI UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan
3. Dr. Tamamudin, M.M selaku Wakil Dekan bidang Akademik dan Kelembagaan FEBI UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan
4. Bapak Ade Gunawan, M.M selaku Ketua Program Studi Akuntansi Syariah FEBI UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan
5. Bapak Novendi Arkham Mubtadi, M.Akun selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini
6. Ibu Siti Aminah Caniago, selaku Dosen Penasehat Akademik (DPA)
7. Bapak/Ibu selaku dosen penguji

8. Bapak/Ibu pegawai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Pekalongan yang telah membantu dalam memperoleh data yang saya perlukan
9. Keluarga besar yang telah memberikan bantuan dan dukungan material dan moral
10. Sahabat yang banyak membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini

Akhir kata, saya berharap Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Pekalongan, 30 Januari 2023



Zulfa Romizah

DAFTAR ISI

JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA.....	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
PEDOMAN LITERASI.....	xv
DAFTAR TABEL.....	xx
DAFTAR GAMBAR.....	xxi
DAFTAR LAMPIRAN	xxii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	11
E. Sistematika Pembahasan	12
BAB II LANDASAN TEORI	14
A. Landasan Teori.....	14

B. Telaah Pustaka	24
C. Model Penelitian	35
D. Hipotesis.....	36
BAB III METODE PENELITIAN	43
A. Metode Penelitian.....	43
B. Pendekatan Penelitian	43
C. Setting Penelitian	43
D. Populasi dan Sampel Penelitian	43
E. Variabel Penelitian	45
F. Sumber Data.....	47
G. Teknik Pengumpulan Data.....	48
H. Metode Analisis Data.....	49
BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN.....	54
A. Hasil Penelitian	54
B. Pembahasan.....	69
BAB V PENUTUP	87
A. Kesimpulan	87
B. Keterbatasan Penelitian.....	89
C. Implikasi Teoritis dan Praktis	90
DAFTAR PUSTAKA	91
LAMPIRAN.....	I
Lampiran 1 Kuesioner Penelitian	I
Lampiran 2 Surat Izin Penelitian	VII

Lampiran 3 Tabulasi Data Kuesioner.....	X
Lampiran 4 Hasil Penelitian	XXI
Lampiran 5 Hasil Pengujian SmartPLS.....	XXIII
Lampiran 6 Dokumentasi	XXVI

PEDOMAN LITERASI

Transliterasi Arab – Latin yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan kebudayaan RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987.

1. Konsonan

Berikut daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	ş	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Şad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Đad	đ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ža	ž	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge

ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha

2. Vokal

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	Fathah	A	A
◌ِ	Kasrah	I	I
◌ُ	Dhammah	U	U

2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌ِي	Fathah dan ya	Ai	a dan i
◌ِو	Fathah dan wau	Au	a dan u

3) Maddah (Vokal Panjang)

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
... َ.	Fathah dan alif atau ya	A	a dan garis di atas
... ِ	Kasrah dan ya	I	i dan garis di atas
... ُ	Hammah dan wau	U	u dan garis di atas

4) Ta'marbutah

Transliterasi untuk ta'marbutah ada dua:

a. Ta'marbutah hidup

Ta'marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah "t".

b. Ta'marbutah mati

Ta'marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

c. Jika pada kata terakhir dengan ta'marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta'marbutah itu ditransliterasikan dengan ha(h).

5) Syaddah

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tasydid, dalam transliterasi ini tanda

syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

6) Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu terletak diawal kata, isi dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

7) Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

8) Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

9) Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman Tajwid.

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Capaian Hasil SAKIP Kabupaten Pekalongan.....	3
Tabel 2.1 Telaah Pustaka	24
Tabel 3.1 Data Sampel OPD	44
Tabel 3.2 Definisi Operasional	46
Tabel 3.3 Skala Likert	49
Tabel 3.4 Parameter Uji Reliabilitas	52
Tabel 4.1 Tingkat Pengembalian Kuesioner	54
Tabel 4.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	55
Tabel 4.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Umur.....	55
Tabel 4.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir	56
Tabel 4.5 Karakteristik Responden Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan	56
Tabel 4.6 Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Bekerja	57
Tabel 4.7 Hasil Pengujian Validitas Konvergen	60
Tabel 4.8 Hasil Cross Loading.....	61
Tabel 4.9 Hasil Nilai Average Variance Extracted (AVE)	62
Tabel 4.10 Hasil Uji <i>Composite Reliability</i>	63
Tabel 4.11 Hasil Nilai R-Square	64
Tabel 4.12 Hasil Pengujian Hipotesis	65

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Model Penelitian	35
Gambar 4.1 Model Skema Awal.....	58
Gambar 4.2 Hasil <i>Outer Model</i>	59

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Kuesioner Penelitian	I
Lampiran 2 Surat Izin Penelitian	VII
Lampiran 3 Tabulasi Data Kuesioner	X
Lampiran 4 Hasil Penelitian	XXI
Lampiran 5 Hasil Pengujian SmartPLS.....	XXIII
Lampiran 6 Dokumentasi	XXVI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan wujud kewajiban instansi pemerintah yang digunakan sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam melaksanakan tujuan organisasi yang telah ditetapkan (Setyawan, 2017). Sebagai organisasi di bidang pelayanan publik, pemerintah harus melaksanakan tata kelola yang baik. Pemerintah dengan tata kelola yang baik merupakan pemerintah yang berhasil mempertanggungjawabkan hasil kinerja dan bebas korupsi. Pemerintah yang berhasil mempertanggungjawabkan hasil kinerja dan bebas korupsi adalah pemerintah yang berhasil memiliki tata kelola yang baik. Salah satu dari faktor pendukung tata kelola yang baik adalah adanya peningkatan akuntabilitas kinerja (Mulya & Fauzihard, 2022). Penguatan akuntabilitas kinerja menjadi salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, dan meningkatnya kualitas pelayanan publik.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah telah dilaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja pemerintah daerah oleh Inspektorat Provinsi dan hasilnya telah diverifikasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Evaluasi ini bertujuan untuk menilai akuntabilitas dan pertanggungjawaban atas hasil terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi pada hasil serta memberikan saran perbaikan yang dibutuhkan (*LKJiP Kabupaten Pekalongan, 2021*).

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah instrumen yang digunakan instansi pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dalam mempertanggungjawabkan misi organisasi. SAKIP merupakan penerapan manajemen kinerja pada instansi pemerintah yang sejalan dengan penerapan reformasi birokrasi, dengan fokus pada hasil dan sebagai sarana untuk mencapai hasil yang lebih baik. Tahapan SAKIP terdiri dari: perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja.

Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian sasaran strategis pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan antara lain: pada saat pelaksanaan evaluasi SAKIP dokumen yang perlu disajikan bukan hanya LKJiP saja namun dokumen lain juga perlu disajikan, serta terdapat rekomendasi hasil evaluasi AKIP yang perlu ditindak lanjuti. Berdasarkan hambatan tersebut perlu dilakukan tindakan untuk mengatasinya antara lain: monitoring dan evaluasi data capaian kinerja secara berkala yang tertera dalam e-sakip, menyajikan dokumen pendukung yang dibutuhkan dalam evaluasi SAKIP serta menghadirkan OPD terkait (*LKJiP Setda Kabupaten Pekalongan, 2021*).

Hasil akhir dari SAKIP adalah laporan capaian kinerja yaitu Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP). LKJiP adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat mengenai kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran. Terkait peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, evaluasi akuntabilitas kinerja sangat dibutuhkan bagi instansi pemerintah untuk memastikan bahwa mereka melaksanakan tugasnya sesuai dengan cara mereka sebelumnya melakukan tugasnya. Evaluasi LKJiP merupakan aktivitas analisis kritis, penilaian sistematis, pemberian atribut, serta pemberian solusi untuk tujuan peningkatan kinerja dan akuntabilitas instansi pemerintah. Hasil dari pelaksanaan evaluasi secara keseluruhan, KEMENPAN & RB memberikan peringkat nilai antara lain: AA (Sangat Memuaskan), A (Memuaskan), BB (Sangat Baik), B (Baik), CC (Cukup), C (Kurang), D (Sangat kurang).

Pada tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Pekalongan memperoleh penghargaan SAKIP tahun 2020 dengan predikat “B” dari Menpan RB. Hasil evaluasi SAKIP tahun 2020 adalah “B” atau tetap sama seperti tahun 2019. Secara keseluruhan ukuran capaian kinerja pada urusan pemerintahan umum di Kabupaten Pekalongan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1 Capaian Hasil SAKIP Kabupaten Pekalongan

No	Indikator Kinerja	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Capaian Predikat SAKIP	CC	B	B	B	B
2.	Capaian Nilai SAKIP	58,72	60,52	63,51	64,02	64,52

Sumber : RKPD Kabupaten Pekalongan Tahun 2022

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa tahun 2017-2021 tidak mengalami peningkatan pada capaian predikat SAKIP. Namun pada tahun 2020 memperoleh nilai 64,02 lebih baik dibanding tahun 2019 memperoleh nilai 63,51 dan tahun 2021 memperoleh nilai 64,52. Penilaian ini menunjukkan bahwa tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran cukup baik dibandingkan dengan capaian kinerjanya, kualitas pembangunan kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan mengarah pada hasil di Pemerintah Kabupaten Pekalongan sudah menunjukkan hasil yang baik, tetapi masih membutuhkan perbaikan (*RKPD Kabupaten Pekalongan, 2022*). Salah satu contoh OPD yang memperoleh capaian penilaian SAKIP yang belum stabil adalah Dinas Kesehatan (LKJip Kabupaten Pekalongan Tahun 2021). Pada tahun 2020 Dinkes mendapatkan capaian sebesar 70,05 sedangkan tahun 2021 mengalami penurunan yaitu 60,25. Hal ini terjadi karena rencana kerja yang sudah dibuat dengan hasil yang kurang sesuai sehingga tidak mencapai target yang diharapkan. Selain itu pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan mengalami hal yang sama. Pada tahun 2020 capaian hasil menunjukkan angka 64,16 sedangkan tahun 2021 63,66. Hal itu terjadi disebabkan karena perencanaan kinerja yang kurang baik sehingga program dan kegiatan belum mencapai target yang ditetapkan (*LKJIP Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, 2021*). Berdasarkan hasil wawancara, Bapak Muhaemin menyatakan bahwa:

“Dalam penilaian SAKIP terdapat beberapa tahapan, antara lain: perencanaan audit, reuiu, pelaporan hasil, dan evaluasi. Apabila kelima proses tersebut terdapat kekurangan, maka akan

mempengaruhi pencapaian predikat SAKIP. Selain itu, hasil yang kurang memuaskan bisa terjadi karena kurang sesuainya antara perencanaan kinerja dengan hasilnya, kurang memenuhi indikator yang sudah ditentukan, dan pencapaian target yang belum maksimal”.

(Muhaemin, 2022)

Dalam pencapaian predikat SAKIP di Kabupaten Pekalongan, Pemerintah daerah akan memberikan *reward* berupa sertifikat penghargaan kepada OPD yang berhasil mencapai target akuntabilitas kerjanya dan memperoleh capaian yang lebih baik sedangkan *punishment* diberikan kepada OPD yang belum maksimal dalam mencapai target akuntabilitas kinerja maupun yang mengalami penurunan dalam capaian akuntabilitas kinerja yaitu berupa evaluasi lanjutan dan memberikan pelatihan. Selain itu provinsi juga akan memberikan *reward* bagi pemerintah daerah yang berhasil mencapai nilai SAKIP yang baik yaitu berupa pemberian Dana Insentif Daerah (DID) dengan tujuan sebagai penyemangat agar tetap mempertahankan atau berusaha untuk yang lebih baik dan sebagai motivasi bagi pemerintah daerah lainnya (Muhaemin, 2022).

Menurut Nasution (2020) dampak dari banyaknya kinerja instansi pemerintah yang belum menunjukkan produktivitas yang signifikan maka kinerja instansi pemerintah saat ini lebih banyak memperoleh sorotan. Hal itu menyebabkan semakin meningkatnya perjanjian yang diajukan rakyat kepada pemerintah atas pelayanan publik yang lebih baik. Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik, maka akan tercipta Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penerapan akuntabilitas

kinerja bertujuan agar penyelenggaraan pemerintahan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bertanggungjawab serta terbebas dari korupsi (Mardiasmo, 2018). Fungsi anggaran merupakan hal yang sangat penting dalam lingkup pemerintah daerah terutama dalam akuntabilitasnya. Hal ini terjadi karena berhubungan dengan fungsi pemerintah dalam memberikan pelayanannya kepada masyarakat. Oleh sebab itu, dalam penelitian Setyawan (2017) anggaran daerah harus dinyatakan secara jelas, spesifik dan dapat dikuasai oleh orang-orang yang bertanggung jawab dalam menyusun dan melaksanakan. Pelaksana anggaran memberikan reaksi positif dan relatif kuat untuk meningkatkan kejelasan sasaran anggaran. Reaksi tersebut adalah peningkatan kepuasan kerja, penurunan ketegangan kerja, peningkatan sikap pegawai terhadap anggaran, kinerja anggaran dan efisiensi biaya pada pelaksana anggaran secara signifikan apabila sasaran anggaran dinyatakan secara jelas. Penetapan sasaran yang spesifik akan lebih produktif daripada tidak menetapkan sasaran yang spesifik. Pegawai juga akan lebih terdorong untuk melaksanakan yang terbaik bagi pencapaian sasaran yang diinginkan apabila sasaran ditetapkan secara lebih spesifik.

Ketaatan pada peraturan perundangan juga merupakan faktor penting yang secara langsung berhubungan dengan kinerja instansi pemerintah. Hasbuddin dkk (2021) berpendapat jika pemerintah daerah menaati peraturan diharapkan laporan akuntabilitas yang dihasilkan tepat dan sesuai dalam rangka pemenuhan kewajiban terhadap pemerintah pusat dan kebutuhan informasi publik. Menurut Setyawan (2017) bahwa beberapa faktor yang memengaruhi akuntabilitas kinerja. Salah satu faktor yang mempengaruhi adalah hubungan antara ketaatan pada

peraturan perundangan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Ketaatan terhadap peraturan perundangan akan mempengaruhi akuntabilitas kinerja dengan diperkuat oleh kinerja manajerial, karena dengan adanya ketaatan terhadap peraturan perundangan akan menghasilkan kinerja yang baik. Tingkat kepercayaan publik terhadap instansi akan rendah, jika kinerja manajerial instansi pemerintah buruk. Hal ini dapat menyebabkan lemahnya pengaruh kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi dan ketaatan pada peraturan perundangan pada akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Yusliana dan Nadirsyah (2017) sistem pengendalian merupakan faktor yang mempengaruhi AKIP. Sistem pengendalian yang menggunakan informasi akuntansi dikenal sebagai sistem pengendalian berbasis akuntansi atau sistem pengendalian akuntansi. Pengendalian akuntansi adalah prosedur dan sistem formal yang menggunakan informasi untuk mempertahankan atau mengubah pola aktivitas organisasi. Berdasarkan penelitian terdahulu, adanya pengendalian akuntansi diharapkan proses yang dilakukan dalam manajemen organisasi menjamin sumber daya digunakan secara ekonomis, efisien dan efektif dengan menerima umpan balik berupa kinerja dan mengambil strategi yang diperlukan apabila kinerja yang dilakukan berbeda dengan yang telah direncanakan untuk meningkatkan pertanggungjawaban kinerja organisasi (Mikoshi, 2020).

Sistem pelaporan juga merupakan salah satu faktor tambahan yang berpotensi berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Untuk melihat hasil evaluasi pegawai terhadap pertanggungjawaban dibutuhkan sistem

pelaporan. Menurut Hafzhan (2021) sistem pelaporan yaitu suatu kewajiban untuk menyampaikan semua aktivitas dan sumber daya yang perlu dipertanggung jawabkan. Sistem pelaporan yang baik dibutuhkan untuk mengontrol dan mengendalikan kinerja manajer dalam menerapkan anggaran yang sudah ditetapkan.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Haryani & Julita (2021) Ketaatan pada peraturan perundangan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan Oktaviani (2019) yang menyatakan bahwa ketaatan pada peraturan perundangan tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Pada penelitian Setyawan (2017) menunjukkan hasil kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, berbeda dengan penelitian Anisa dan Haryanto (2022) yang menyatakan kejelasan sasaran anggaran tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hasil penelitian untuk pengendalian akuntansi juga memiliki hasil yang berbeda, dimana menurut penelitian Pratama dkk (2019) pengendalian akuntansi berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, namun berbanding terbalik dengan penelitian Widaryanti & Pancawardani (2018) yang menyatakan pengendalian akuntansi secara parsial tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Penelitian untuk sistem pelaporan juga menghasilkan hasil yang berbeda, penelitian Harianto dkk (2021) menghasilkan sistem pelaporan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah berbanding terbalik dengan penelitian Mulya & Fauzihard (2022) yang menyatakan sistem

pelaporan tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Kinerja manajerial yang baik akan mempengaruhi dalam pelaporannya. Kinerja manajerial dapat memoderasi ketaatan pada peraturan perundangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sejalan dengan penelitian Setyawan (2017). Pada penelitian Lesmana & Maimunah (2017) hasilnya menyatakan kinerja manajerial tidak mampu memoderasi hubungan kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Namun berbanding terbalik dalam penelitian yang dilakukan oleh Sembiring (2017) dan Anugerah (2015) yang menyatakan bahwa kinerja manajerial mampu memoderasi pengaruh kejelasan sasaran anggaran dengan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Penelitian yang dilakukan oleh Setyawan (2017) dan Sembiring (2017) menyatakan bahwasanya kinerja manajerial mampu memoderasi hubungan antara pengendalian akuntansi dengan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Namun riset ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan Lesmana & Maimunah (2017) yang menyatakan kinerja manajerial tidak memoderasi pengaruh pengendalian akuntansi terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Melihat perbedaan hasil penelitian terdahulu yang tidak konsisten, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul “Faktor-faktor Yang Memengaruhi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dengan Kinerja Manajerial Sebagai Variabel Moderasi”.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah ketaatan pada peraturan perundangan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah?
2. Apakah kejelasan sasaran anggaran berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah?
3. Apakah pengendalian akuntansi berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah?
4. Apakah sistem pelaporan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah?
5. Apakah kinerja manajerial mampu memoderasi ketaatan pada peraturan perundangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah?
6. Apakah kinerja manajerial mampu memoderasi pengaruh kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah?
7. Apakah kinerja manajerial mampu memoderasi pengaruh pengendalian akuntansi terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah?
8. Apakah kinerja manajerial mampu memoderasi sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menguji pengaruh ketaatan pada peraturan perundangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
2. Untuk mengetahui dan menguji pengaruh kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

3. Untuk mengetahui dan menguji pengaruh pengendalian akuntansi terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
4. Untuk mengetahui dan menguji pengaruh sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
5. Untuk mengetahui dan menguji pengaruh kinerja manajerial dalam memoderasi hubungan ketaatan pada peraturan perundangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
6. Untuk mengetahui dan menguji pengaruh kinerja manajerial dalam memoderasi hubungan kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
7. Untuk mengetahui dan menguji pengaruh kinerja manajerial dalam memoderasi hubungan pengendalian akuntansi terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
8. Untuk mengetahui dan menguji pengaruh kinerja manajerial dalam memoderasi hubungan sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian diharapkan mempunyai manfaat baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan hasil penelitian dapat digunakan untuk menambah sumber pustaka di bidang ilmu pengetahuan dan dapat dijadikan referensi bagi

peneliti selanjutnya dan representatif khususnya yang berhubungan dengan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

2. Manfaat Praktis

Penulis berharap penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan informasi, pertimbangan dan evaluasi bagi OPD Kabupaten Pekalongan khususnya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sehingga dapat mendukung penyempurnaan akuntabilitas kinerja OPD Kabupaten Pekalongan.

E. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini dibagi menjadi lima bab, yang akan dibagi menjadi beberapa subbagian. Di bawah ini adalah sistematika penulisan yang akan digunakan:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini mencakup landasan teori yang mendasari penelitian, telaah pustaka, dan kerangka berpikir yang kemudian akan digunakan dalam memecahkan permasalahan mengenai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini mencakup metode-metode yang digunakan peneliti, jenis dan pendekatan penelitian, setting penelitian, populasi dan sampel

penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan metode analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan mengenai hasil yang diperoleh dari pelaksanaan penelitian terhadap hasil analisis dari pengaruh ketaatan pada peraturan perundangan, kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi, dan sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dengan kinerja manajerial sebagai variabel moderasi.

BAB V PENUTUP

Bab ini akan menguraikan tentang kesimpulan, keterbatasan dari penelitian yang telah dilakukan, dan implikasi baik teoritis maupun praktis.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan pada penelitian ini, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Ketaatan pada peraturan perundangan berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada organisasi perangkat daerah. Hal ini dikarenakan OPD Kab. Pekalongan mampu menghindari dari tindakan penyimpangan dan telah memenuhi persyaratan, sehingga menghasilkan laporan akuntabilitas kinerja yang sesuai dengan peraturan pemerintah. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwasanya ketaatan pada peraturan perundangan dapat mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
2. Kejelasan sasaran anggaran tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hal ini disebabkan adanya ketidakjelasan sasaran anggaran yang menyebabkan pelaksana anggaran menjadi bingung, tidak tenang, dan tidak puas ketika bekerja serta perencanaan dan pelaksanaan anggaran yang kurang jelas serta tidak ada kepuasan dalam bekerja. Hal ini akan menyebabkan pelaksana anggaran tidak termotivasi untuk mencapai kinerja yang diharapkan.
3. Pengendalian akuntansi berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada organisasi perangkat daerah.

Laporan akuntabilitas kinerja dibuat oleh pegawai yang membidangi, sehingga apabila pengendalian akuntansinya jelas dan dapat dipahami maka akuntabilitas kinerja instansi pemerintah juga akan mencapai hasil yang lebih baik.

4. Sistem pelaporan tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hal ini dikarenakan OPD di Kabupaten Pekalongan belum menunjukkan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel, informasi yang disajikan pada laporan keuangan dan proses penyusunan laporan juga masih kurang sesuai dengan prinsip akuntansi. Dengan demikian sistem pelaporannya harus diperbaiki agar bisa menunjukkan akuntabilitas kinerja yang lebih baik kepada masyarakat.
5. Kinerja manajerial tidak mampu memoderasi variabel ketaatan pada peraturan perundangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Karena akuntabilitas kinerja di OPD Kabupaten Pekalongan menjadi lebih baik karena terdapat kebijakan kepala daerah dalam memberikan *reward* dan *punishment*. Oleh karena itu pemerintah akan melihat secara langsung pengaruh ketaatan pada peraturan perundangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah tanpa melihat kinerja dari manajer.
6. Kinerja manajerial tidak mampu memoderasi hubungan kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hal ini menyebabkan kinerja manajerial tidak dapat berperan sebagai penguat dalam hubungan kejelasan sasaran anggaran dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

7. Kinerja manajerial tidak mampu memoderasi variabel pengendalian akuntansi perundangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Semakin baik akuntabilitas kinerja instansi pemerintah tidak dipengaruhi oleh kinerja manajerial dan pengendalian akuntansi. Kinerja manajerial dalam penelitian ini berperan sebagai variabel *predictor moderasi*, artinya variabel ini hanya berperan sebagai variabel independen dalam model hubungan yang dibentuk. Oleh karena itu disimpulkan bahwa kinerja manajerial tidak mampu memoderasi pengendalian akuntansi dan tidak mempunyai hubungan yang signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
8. Kinerja manajerial tidak mampu memoderasi hubungan sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Dikarenakan kinerja manajerial berperan sebagai variabel *predictor moderasi*, artinya variabel ini hanya berperan sebagai variabel independen dalam model hubungan yang dibentuk. Oleh karena itu pemerintah akan melihat secara langsung pengaruh sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah tanpa melihat kinerja dari manajer.

B. Keterbatasan Penelitian

Penelitian atau riset ini memiliki beberapa keterbatasan antara lain:

1. Penelitian hanya dilaksanakan pada satu pemerintah daerah saja yaitu OPD Kabupaten Pekalongan sehingga ruang lingkup penelitian ini sangat kecil
2. Waktu tunggu pengisian kuesioner yang cukup lama sehingga menyebabkan keterlambatan dalam mengolah data

3. Data penelitian yang berisi pernyataan tertutup menyebabkan peneliti sulit untuk mendapatkan argumen secara langsung dan jelas.

C. Implikasi Teoritis dan Praktis

1. Implikasi Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan terkait akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Walaupun tidak semua variabel independen dapat memengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, namun terdapat dua variabel yang mempunyai pengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yaitu variabel etatan pada peraturan perundangan dan pengendalian akuntansi. Selain itu diharapkan juga dapat menambah pengetahuan terkait teori *agency* yang mempunyai relevansi terhadap pemerintahan terutama akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

2. Implikasi Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pemerintah daerah Kabupaten Pekalongan dalam peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Sehingga hasil penelitian diharapkan mampu menjadi bahan evaluasi bagi OPD Kabupaten Pekalongan untuk menciptakan akuntabilitas kinerja yang lebih baik. Selain itu, untuk Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Pekalongan dianjurkan agar mempublikasikan atau menyampaikan informasi mengenai akuntabilitas kinerja kepada masyarakat serta memanfaatkan situs website sebagai sarana yang efektif untuk sistem pelaporannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Afriantoni, & Erwati, M. (2018). Pengaruh Penerapan Informasi Akuntansi Manajemen, Sistem Pengukuran Kinerja, Dan Sistem Penghargaan Terhadap Kinerja Manajerial Pada Perusahaan Ritel Modern Di Kota Jambi. *Jurnal Riset Akuntansi Terpadu*, 12(1).
- Anisa, I. N., & Haryanto. (2022). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, Dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Akuntansi Aktual*, 9, 77–85.
- Anugerah, R. P. (2015). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Dan Ketidakpastian Lingkungan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Dengan Kinerja Manajerial Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Pekanbaru). *JOM Fekon*, 2(2), 1–15.
- Candra, V., Simartama, N. I. P., & Purba, S. (2021). *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yayasan Kita Menulis.
- Dewata, E., Sari, Y., Juhari, H., & Lestari, T. D. (2020). Ketaatan Pada Peraturan Perundangan, Sistem Pelaporan Dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 8(3), 541–550.
- Djaali. (2020). *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. PT Bumi Aksara.
- Duli, N. (2019). *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. CV Budi Utama.
- Duryani. (2021). *Metode Penelitian Ilmiah*. Yayasan Prima Agus Teknik.
- Furadantin, N. R. (2018). Analisis Data Menggunakan Aplikasi SMARTPLS V.3.2.7 2018. *Jurnal Manajemen Universitas Palangka Raya*.
- Ghazali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBS SPSS 26*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghazali, I., & Latan, H. (2015). *Partial Least Squares Konsep, Teknik Dan Aplikasi Menggunakan Program Smartpls 3.0. Ed. Ke-2*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hafzhan. (2021). *Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi Dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Kasus Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Medan)*.

- Harianto, D., Kennedy, & Zarefar, A. (2021). *Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (Akip)*. 6(1), 122–139. <https://doi.org/10.29303/Jaa.V6i1.111>
- Haryani, S., & Julita, J. (2021). Determinan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah: Studi Pada Pemerintah Kota Pekanbaru. *CURRENT: Jurnal Kajian Akuntansi Dan Bisnis Terkini*, 2(1), 78–93.
- Haryanto, Sahmuddin, & Arifudin. (2007). *Akuntansi Sektor Publik*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hasbuddin, Husin, & Herman, Y. (2021). Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, Pemahaman Akuntansi, Dan Ketaatan Pada Peraturan Perundangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Kasus Pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Kendari). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan (JAK)*, 6(2), 331–346.
- Hermawan, S., & Amirullah. (2017). *Metode Penelitian Bisnis*. Media Nusa Creative.
- Hidayat, T., Mustika, A., & Murialti, N. (2021). Pengaruh Good Governance, Kompetensi, Dan Pengendalian Akuntansi Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Kampar. *Prosiding Seminar Nasional Ekonomi, Bisnis & Akuntansi, 1*, 87–97.
- Hidayatullah, A., & Herdjiono, I. (2018). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja SKPD Di Merauke. *Prosiding Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu & Call For Papers*.
- Karima, D., Maslichah, & Sudaryanti, D. (2021). Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, Pemahaman Akuntansi, Dan Ketaatan Pada Peraturan Perundangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah. *Jurnal Riset Akuntansi*, 10(06), 10–24.
- Lesmana, D., & Maimunah, M. (2017). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Sistem Pengendalian Akuntansi Dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Dengan Kinerja Manajerial Sebagai Variabel Moderasi Pada Instansi Pemerintah Kota Palembang. *Jurnal Manajemen, Akuntansi, Dan Ekonomi Pembangunan*, 12(1).
- LKJIP Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan*. (2021).
- LKJIP Kabupaten Pekalongan*. (2021).
- Lkkip Setda Kabupaten Pekalongan*. (2021).

- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Andi.
- Masni, & Zulfaidah. (2021). *Kinerja Manajerial*. CV Cahaya Arsh Publisher & Printing.
- Mikoshi, M. S. (2020). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi Dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja (Studi Empiris Koni Se Sumatera Barat). *Ekonomis: Journal Of Economics And Business*, 4(1), 192. <https://doi.org/10.33087/Ekonomis.V4i1.116>
- Mina, M. N. (2020). Pengaruh Pengawasan Fungsional, Pengelolaan Keuangan, Dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Kota Malang. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi (JRMA)*, 8(2), 1–9.
- Muhaemin. (2022). *Wawancara*.
- Mulya, H. G., & Fauzihard, E. (2022). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi Dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dengan Kepatuhan Terhadap Regulasi Sebagai Variabel Pemoderasi. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 4(1), 192–212.
- Nasution, D. P. E. (2020). Pengaruh Realisasi Anggaran, Pengendalian Akuntansi, Dan Efisiensi Anggaran Terhadap Akuntabilitas Pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Surabaya. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 9(7), 1–20.
- Oktaviani, S. (2019). Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, Pemahaman Akuntansi, Ketaatan Pada Peraturan Perundangan Dan Motivasi Kerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (Studi Empiris Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kuantan Singi. *Jurnal Ekonomi Al-Khitmah*, 1(1), 484–494.
- Pratama, R., Agustin, H., & Taqwa, S. (2019). Pengaruh Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan Dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 1(1), 429–444.
- Rahman, A., & Yusuf, M. (2021). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. *YUME: Journal Of Management*, 4(2), 257–270. <https://doi.org/10.37531/Yume.Vxix.334>
- Rengganis, A., Haruna, N. H., & Sari, A. C. (2022). *Penelitian Dan Pengembangan*. Yayasan Kita Menulis.
- Riyanto, S., & Andhita Hatmawan, A. (2020). *Metode Riset Penelitian Kuantitatif Penelitian Di Bidang Manajemen, Teknk, Pendidikan, Dan Eksperimen*. Deepublish.
- RKPD Kabupaten Pekalongan*. (2022).

- Rusdiana, & Nasihudin. (2002). *Akuntabilitas Kinerja Dan Pelaporan Penelitian*. Pusat Penelitian Dan Penerbitan UIN SGD Bandung.
- Sa'adah, L. (2021). *Statistik Inefensial*. Unoversitas KH. A Wahab Hasbullah.
- Sembiring, H. A. L. (2017). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Ketidakpastian Lingkungan Dan Pengendalian Akuntansi Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dengan Kinerja Manajerial Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empirit Pada SKPD Kota Pekanbaru). *JOM Fekon*, 4(1).
- Setyawan, H. (2017). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi Dan Ketaatan Pada Peraturan Perundangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dengan Kinerja Manajerial Sebagai Variabel Moderating. *JOM Fekon*, Vol. 4(No.1), 251–264.
- Sholihin, M., & Ratnamono, D. (2021). *Analisis SEM-PLS Dengan Warppls 7.0*. CV Andi Offset.
- Siallagan, H. (2020). *Teori Akuntansi*. LPPM UHN Press.
- Siregar, S. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif*.
- Soeksin, S. D., Friandi, S. Z., & Rifai, D. (2020). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Dan Partisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Tarakan. *JAMAN*, 1(1), 40–47.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif Dan R&D*. CV Alfabeta.
- Supriyono, R. . (2018). *Akuntansi Keperilakuan*. Gadjah Mada University Press.
- Tarjo. (2021). *Metode Penelitian Administrasi*. Syiah Kuala University Press.
- Wahid, I. (2016). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah, Sistem Pelaporan, Dan Ketaatan Pada Peraturan Perundangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Dae. *JOM Fekon*, 3(1).
- Wardani, N. D., & Silvia, D. (2021). Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja Dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (Lpmp) Provinsi Lampung. *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi Unsurya*, 6(1), 47–56.
- Widaryanti, & Pancawardani, N. L. (2018). Analisis Pengaruh Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan Dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi*, 32, 376–390.

- Widia, & Verawati. (2017). Pengaruh Faktor Kejelasan Sasaran Anggaran, Faktor Akuntansi, Dan Faktor Ketaatan Pada Peraturan Perundangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. In *Seminar Hasil Penelitian*.
- Wulandari, W. R. (2017). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Dan Penekanan Anggaran Terhadap Senjangan Anggaran Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris Pada SKPD Kabupaten Indragiri Hulu). *JOM Fekon*, 4(1).
- Yusliana Dan Nadirsyah. (2017). Pengaruh Sistem Pelaporan Dan Pengendalian Akuntansi Terhadap Efektifitas Sistem Pengendalian Manajemen (Studi Pada Fakultas-Fakultas Dalam Lingkungan Universitas Muhammadiyah Aceh). *Jurnal Telaah Dan Riset Akuntansi*, Vol. 10(No. 2), 153–162.